



**News Title : Amburadul Tata Kelola Sawit RI: Harga Didikte Asing, Ekspor Bocor Entah Ke Mana**

**Media Name : kumparan.com**

**Journalist : -**

**Publish Date : 03 March 2023**

**Tonality : Positive**

**News Page :**

**News Value : 3,000,000**

**Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)**

**Ads Value : 1,000,000**

**Section/Rubrication : Bisnis**

**Topic : Aturan Izin Ekspor CPO**

**Amburadul Tata Kelola Sawit RI: Harga Didikte Asing, Ekspor Bocor Entah Ke Mana**



Indonesia merupakan eksportir minyak sawit atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Bahkan pada 2022 ekspor CPO Indonesia memberikan kontribusi sebesar 51,04 persen dari total permintaan dunia.

Sebagai raja produsen CPO, Indonesia ternyata tak mampu berdaya menentukan harga pasaran ekspor CPO. Saat ini, harga pasaran ekspor CPO Indonesia memang pada tiga indeks yaitu harga Rotterdam, MDEB Malaysia, dan ICEX (Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia).

Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian RI, Didid Noordiatmoko menjelaskan, dalam menentukan harga pasaran ekspor CPO Indonesia, 20 persen bebannya ditentukan dari MDEB Malaysia, 20 persen harga Rotterdam, dan 60 persen harga ICEX.

"Sayangnya di ICEX ini juga masih sangat rendah volume perawatannya, sehingga volume kita sudah ada penjalanan fisik di bursa, tapi ini belum bisa diungkap harga acuan, ini belum dianggap transparan karena volumenya sangat kecil," kata Didid dalam diskusi Strategi Indonesia Menjadi Barometer Harga Sawit Dunia, Sabtu, 3 Maret 2023.

Untuk itu, Didid mengimbau agar ini Kementerian Perdagangan akan mendorong agar transaksi CPO akan masuk ke dalam bursa. Kementerian telah mengatur sawit akan masuk bursa berjangka pada awal tahun ini, dan di akhir tahun sudah terbentuk harga acuannya.

**Ekspor Bocor, Pendapatan Negara Turun**

Didid mengungkapkan, ekspor sawit yang dibakukan Indonesia ternyata ada tumpang tindih data antara laporan pemerintah Indonesia dengan data dari negara impor. Misalnya tak kecil, ada yang ratusan ribu ton bahkan jutaan ton. Hal ini terus terjadi dari 2019 hingga 2021.



Perlu memastikan terdapat audit yang lengkap untuk audit ekspor minyak CPO ke 100 negara pembeli minyak kelapa sawit.

Contoh di China, pemerintah melaporkan ekspor CPO ke China pada 2020 sebanyak 3,879,100 ton, sementara China melaporkan hanya 3,747,624 ton, ada selisih 131,476 ton CPO yang entah ke mana.



Salah satu jenis di antara 107 PT Perkebunan Terbatas yang beroperasi di Pulau Kalimantan.

"Selalu terdapat selisih. Ini mengindikasikan bisa jadi terjadi kebobrokan volume ekspor. Ternyata ekspor kita (pemerintah) lebih banyak, ternyata di sana terima impor dari Indonesia lebih dari itu atau bisa datang dari itu. Kalau begitu kemana larisnya," kata Didid.

Sementara di USA, pemerintah melaporkan ekspor CPO ke USA pada 2021 sebanyak 2,461,805, namun USA melaporkan hanya 1,402,600 ton, ada selisih 1,059,205 ton CPO yang entah ke mana. Di tahun 2020 ekspor CPO ke USA versi pemerintah ada 2,479,202 ton, sementara yang dilaporkan USA hanya 17,412 ton, selisih 2,461,790 ton.

"Bisa jadi ini masalah cut off, tapi kalau itu sebenarnya tentu ini bukan sekadar cut off di tanggal awal tahun maupun akhir tahun," ujarnya.

Dari lima negara, China, India, Pakistan, USA, dan Malaysia, dari tahun 2019 hingga 2021 ketimpangan data terbesar adalah di USA yang konsisten besarnya menapaki jutaan ton CPO, sementara negara lainnya ada yang ratusan ribu ton dan puluhan ribu ton.

Dengan harga acuan ICEX yang lebih rendah dari acuan MDEB dan harga Rotterdam, ditambah ada kebobrokan ekspor volume CPO, ini membuat Indonesia kehilangan banyak pendapatan negara dari ekspor CPO.



"Otomatis pungkasan ekspor kita bisa jadi lebih rendah dari seharusnya. Otomatis segala macam pajak mulai dari pajak ekspor sampai nanti ke 17% bea cukai, nanti lebih rendah sehingga ada potensi negara ini tidak menertakan dari yang seharusnya," kata Didid.

Dengan masalah itu, Didid mengatakan memisahkan CPO dalam bursa akan dapat memperbaiki itu. Kalau saat ini Di Tanah air Hal inilah yang saat ini menjadi fokus Kementerian Perdagangan.

"Seharusnya negara bisa terima yang lebih baik dari perdagangan CPO," pungkasa dia.